

# **Implementasi Manajemen Pembiayaan dalam Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Madrasah Aliyah Negeri 1 Bitung, Sulawesi Utara**

**Feiby Ismail, Nindy Sumaila**

Manajemen Pendidikan Islam

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado

*e-mail: feibyismail@iain-manado.ac.id, nindysumaila73@gmail.com*

## **Abstract**

*This study aims to describe the implementation of The School Operational Assistance Fund (BOS) funds finance management in MAN 1 Bitung. BOS aims to relieve the burden of society in terms of education fund. Therefore, proper financial management is needed to achieve its purpose. This research uses qualitative approaches using observation, interviews, and documentation as data collection techniques. The results showed that the implementation of BOS finance management in MAN 1 Bitung was realized through the function of planning, implementation, and supervision. Planning involves formulating a budget draft. Then, the implementation stage is done through socialization and disbursement of funds. The final stage is the supervision stage. Through the implementation of this management function, BOS finance management in MAN 1 Bitung positively impacts the education process. Nevertheless, there is a need to coordinate with every element of the madrasah to ensure accountability for BOS funds.*

**Keywords:** *Financial management, BOS Fund, Madrasah*

## **Abstrak**

*Penelitian ini mendeskripsikan implementasi manajemen pembiayaan dalam pengelolaan dana BOS di MAN 1 Bitung. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bertujuan untuk meringankan beban masyarakat dalam pendidikan. Untuk itu, perlu manajemen yang baik dalam pengelolaan Dana BOS agar dapat dimanfaatkan sesuai tujuannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi manajemen pembiayaan dalam pengelolaan dana BOS di MAN 1 Bitung diwujudkan dalam fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Perencanaan meliputi kegiatan perumusan rancangan*

anggaran. Tahap pelaksanaan melalui sosialisasi dan penyaluran dana. Tahap pengawasan melibatkan semua pihak madrasah. Implementasi fungsi manajemen, pengelolaan dana BOS di MAN 1 Bitung memberikan dampak positif bagi proses pendidikan. Meski demikian, perlu adanya koordinasi dengan setiap elemen madrasah untuk menjamin akuntabilitas penggunaan dana BOS.

**Kata Kunci:** *Manajemen Keuangan, Dana BOS, Madrasah*

## **Pendahuluan**

Manajemen pembiayaan merupakan bagian penting dalam manajemen pendidikan. Sebab hampir semua aktivitas pendidikan membutuhkan anggaran dana dan pengelolaannya harus dilakukan secara profesional. Pada dasarnya, keseluruhan proses dalam manajemen pendidikan mengarah pada pemenuhan kualitas atau mutu pendidikan. Demikian halnya dengan pembiayaan pendidikan, yang menentukan mutu suatu lembaga pendidikan, di samping faktor-faktor lain yang mendukung tercapai tujuan pendidikan.<sup>1</sup> Dengan demikian, pembiayaan seharusnya dikelola dengan baik dan dimanfaatkan untuk menunjang tercapainya tujuan yang telah ditetapkan,<sup>2</sup> sebab pembiayaan merupakan salah satu sumber daya penting dalam pendidikan.<sup>3</sup> Di sisi lain, program pembiayaan pendidikan dapat mendorong perubahan perilaku.<sup>4</sup>

Salah satu jenis pembiayaan pendidikan adalah pembiayaan yang dikeluarkan oleh pemerintah.<sup>5</sup> Pemerintah telah memprioritaskan beberapa program dalam pembangunan, seperti untuk bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur pedesaan, dan bantuan anggaran yang cukup besar adalah

---

<sup>1</sup> Mulyono, *Konsep Pembiayaan Pendidikan* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), hlm. 72.

<sup>2</sup> E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 168.

<sup>3</sup> Ansar Rahman, 'Efisien dalam Pembiayaan Pendidikan untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan', *Jurnal Eklektika*, 5 (2), (2017): 89.

<sup>4</sup> Sissy Osteen, Glenn Muske, and Joyce Jones, 'Financial Management Education: Its Role in Changing Behavior', *Journal of Extension*, 45 (3), (2007).

<sup>5</sup> Dkk. Dadang Suhardan, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 10.

program Bantuan Operasional Sekolah (BOS).<sup>6</sup> Alokasi dana pemerintah dalam bidang pendidikan dalam bentuk dana BOS merupakan konsekuensi dari berkurangnya subsidi di sektor lain, sehingga bidang pendidikan mendapatkan kucuran anggaran yang cukup dalam membiayai aktivitas pendidikan. Anggaran pendidikan yang dialokasikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Dengan mengalokasikan dana bagi sektor pendidikan, maka pemerintah menunjukkan perhatian pada bidang pendidikan sebagai bidang penting dalam pembangunan bangsa. Salah satu upaya tersebut adalah dengan menyalurkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Akan tetapi, kelemahan mendasar pendidikan saat ini terletak pada bidang manajemen dan ketatalaksanaan sekolah. Ketersediaan anggaran dan dana tidak selamanya berbanding lurus dengan tercapainya tujuan pendidikan. Karena pada beberapa kasus terdapat penyalahgunaan anggaran dana BOS. Penyalahgunaan atau kesalahan dalam pengelolaan merupakan indikasi bahwa dana BOS perlu dikelola dengan baik dan profesional. Bisa jadi inilah yang menjadi salah satu penyebab mengapa pendidikan di Indonesia masih belum menunjukkan perkembangan yang lebih baik. Oleh karena itu, pengelola keuangan di sekolah perlu dilatih untuk menerapkan manajemen pembiayaan, sebab hal ini terkait dengan pengelolaan manajemen pembiayaan yang efektif.<sup>7</sup>

Di sinilah pentingnya implementasi manajemen pembiayaan dalam pengelolaan dana sekolah dalam bentuk apa pun. Dengan adanya pengelolaan yang baik dan profesional, maka proses pendidikan akan berjalan dengan baik dalam setiap aspeknya. Pengelolaan biaya adalah bagaimana menggunakan biaya sesuai dengan yang direncanakan.<sup>8</sup> Apalagi saat ini

---

<sup>6</sup> Budi Budaya, 'Manajemen Pembiayaan Pendidikan Pada Sekolah Dasar yang Efektif', *LIKHITAPRAJNA. Jurnal Ilmiah.Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan*, 18 (1), (2017): 43-44.

<sup>7</sup> Matula Phyliters, Angeline Sabina Mulwa, and Dorathy Nduge Kyalo, 'Financial Management for Effective Schools: Bridging Theory and Practice through Competency Development among Secondary School Principals in Kitui County, Kenya', *International Journal of Education and Research*, 6 (11), 2018:2.

<sup>8</sup> Sauqi Futaqi and Imam Machali, 'Pembiayaan Pendidikan Berbasis Filantropi Islam: Strategi Rumah Pintar BAZNAS Piyungan Yogyakarta', *Manageria: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 3 (2), (2019), doi.org/10.14421/manageria.2018.32-02.

pengelolaan sekolah lebih bersifat desentralistik agar lebih mandiri dalam pengelolaan serta memberikan ruang yang lebih luas bagi sekolah (madrasah) dalam mencapai tujuan dan meningkatkan mutu pendidikan.<sup>9</sup> Seharusnya dengan *School Based Management*, yang merupakan model pengelolaan sekolah ini diterapkan pada tahun 1999 di sejumlah sekolah dan madrasah rintisan dengan sebutan MPMBS,<sup>10</sup> pengelolaan pembiayaan pendidikan akan semakin mudah dan di koordinir dengan baik.

Efektivitas pengelolaan anggaran pendidikan dituntut mampu diimplementasikan dalam setiap institusi pendidikan. Pembiayaan pendidikan adalah sebuah analisis terhadap sumber pendapatan (*revenue*) dan penggunaan biaya (*expenditure*) yang diperuntukkan sebagai pengelolaan pendidikan secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan.<sup>11</sup> Pembiayaan pendidikan merupakan upaya pengumpulan dana untuk membiayai operasional dan pengembangan sektor pendidikan.<sup>12</sup>

Pembiayaan pendidikan tentunya akan berguna dan bermanfaat apabila dapat dikelola dengan baik oleh setiap sekolah (madrasah) termasuk pengelolaan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP). Pengelolaan ini sangat penting dalam menjamin pencapaian tujuan pendidikan sesuai dengan anggaran yang ada. Oleh karena itu, ada istilah *budget* yang merupakan rincian anggaran pendidikan yang tertuang dalam rencana operasional kegiatan pendidikan sehingga gambaran kegiatan dan penganggaran tertuang secara jelas pada setiap kegiatan.<sup>13</sup>

---

<sup>9</sup> Hamzah, 'Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah', *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, 10 (1), (2013): 152.

<sup>10</sup> Imam Machali and Ara Hidayat, *The Hand Book of Education Management* (Jakarta: Prenamedia Group, 2018), hlm. 366.

<sup>11</sup> Mulyono, *Konsep pembiayaan Pendidikan* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), hlm. 72.

<sup>12</sup> Indra Bastian, *Akuntansi Pendidikan* (Jakarta: Erlangga, 2006), hlm. 160.

<sup>13</sup> M Djupri, 'Model Manajemen Pembiayaan Pendidikan Menuju SBI di SMPN 2 Rembang', *The Journal of Economic Education*, 1 (1), (2012): 21–25.

## **Prinsip-Prinsip Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan**

Untuk menjamin kualitas pengelolaan pembiayaan pendidikan, maka terdapat sejumlah prinsip yang perlu diperhatikan. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan yakni dengan membuka ruang seluas-luasnya bagi peserta didik tanpa adanya perbedaan latar belakang ekonomi, status sosial, jenis kelamin bahkan perbedaan lain termasuk SARA. Selain itu, terdapat pula prinsip efisiensi, yaitu dengan mengedepankan layanan mutu, relevansi dan adanya layanan pendidikan yang kompetitif. Pengelolaan dana pendidikan juga patut memiliki prinsip transparansi, yang memungkinkan adanya keterbukaan dalam pengelolaan dana serta terpenuhinya unsur tata kelola pemerintah dan penyelenggaraan pendidikan yang baik.

Pengelolaan dana pendidikan yang baik seharusnya juga menganut prinsip akuntabilitas yang bermakna kemampuan pihak pengelola dana dalam hal ini lembaga pendidikan dalam mempertanggung jawabkan dana pendidikan yang dikelola. Hal ini akan dinilai oleh pihak terkait apakah dana pendidikan sudah dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai perencanaan anggaran yang telah disusun sebelumnya. Prinsip akuntabilitas ini memberikan kesempatan bagi pihak luar lembaga pendidikan untuk melakukan kontrol terhadap penggunaan anggaran pendidikan. Prinsip yang terakhir adalah prinsip efektivitas, yakni adanya kesesuaian antara aktivitas pengaturan keuangan dan pembiayaan pendidikan untuk merealisasikan perencanaan pendidikan. Efektivitas dalam pengelolaan dana pendidikan juga berimplikasi bagi kemampuan lembaga pendidikan mencapai tujuan pendidikan yang sudah ditetapkan.

Secara ideal, pengelolaan pembiayaan yang mengedepankan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, akuntabilitas dan efektivitas akan mampu memberikan manfaat bagi pengembangan lembaga pendidikan. Akan tetapi hal ini perlu dibuktikan dalam praktik atau implementasi dalam pengelolaan secara riil di sekolah atau madrasah.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan analisis pengelolaan manajemen pembiayaan sekolah khususnya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Madrasah Aliyah Negeri 1 Bitung, Provinsi Sulawesi Utara.

Madrasah ini memiliki kekhasan tersendiri karena sejak berstatus swasta, madrasah ini telah membebaskan biaya pendidikan bagi siswanya.

### **Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Madrasah Aliyah**

Keberadaan dana BOS tidak lain untuk membantu kegiatan operasional lembaga pendidikan dalam hal keuangan agar semua kegiatan dapat terlaksana dengan baik. Untuk itu, pemerintah telah memberikan batasan tentang penggunaan dana tersebut melalui PP nomor 48/2008 tentang pendanaan pendidikan yang mencakup keseluruhan biaya non personalia.<sup>14</sup> Tentu saja ini menjadi patokan bagi setiap lembaga pendidikan untuk memanfaatkan dana BOS sesuai dengan peruntukannya.

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah bantuan yang diberikan oleh pemerintah yang digunakan untuk membiayai dana operasional non personalia madrasah berupa bahan habis pakai untuk kelancaran proses pembelajaran di madrasah. Secara hukum pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Madrasah Aliyah memiliki landasan hukum yaitu (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (2) PP Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan, PP nomor 47 tahun 2008 tentang wajib belajar, (3) PP nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan pendidikan. Di samping itu, landasan hukum dana BOS merujuk pada PP nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan<sup>15</sup> serta Keputusan Dirjen Pendis No.451/2018 tentang petunjuk teknis BOS pada madrasah. Secara umum, petunjuk teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Madrasah Aliyah bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan yang bermutu.

---

<sup>14</sup> Direktorat Jenderal Pendidikan Indonesia, 'Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Indonesia, Nomor 451 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Madrasah Tahun Anggaran 2018' (Jakarta, 2018).

<sup>15</sup> *Ibid.*

## Manajemen Pembiayaan dalam Pengelolaan Dana Bos

Menurut Lusardi, *The lack of financial literacy is of acute concern and needs immediate attention*,<sup>16</sup> artinya bahwa literasi keuangan khususnya dalam pengelolaan keuangan perlu mendapat perhatian. Hal ini karena dengan pemahaman keuangan yang baik akan dapat terhindar dari kesalahan pengelolaan keuangan. Dalam bidang pendidikan, manajemen pembiayaan pendidikan memberikan pengaruh yang kuat dan signifikan terhadap mutu sekolah.<sup>17</sup> Oleh sebab itu, pengelolaan pembiayaan pendidikan menuntut proses yang sistematis dan profesional. Pengelolaan pembiayaan pendidikan setidaknya dapat dilakukan melalui tiga tahapan yaitu:

### 1. Perencanaan

Perencanaan adalah suatu proses memikirkan dan menetapkan kegiatan-kegiatan atau program untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>18</sup> Dengan demikian, suatu perencanaan harus memuat berbagai hal seperti strategi pelaksanaan, langkah-langkah pelaksanaan, waktu, pelaksana, dan prediksi tentang berbagai hal yang akan terjadi. Sehingga dapat dinyatakan bahwa perencanaan adalah sejumlah rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan demi mencapai tujuan.<sup>19</sup> Dalam kaitan dengan anggaran dana BOS di madrasah, maka penyusunan rencana kerja perlu dilakukan dengan menginventarisasi kebutuhan madrasah. Sebab perencanaan merupakan kegiatan mengidentifikasi tujuan, menentukan prioritas, menjabarkan tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan kegiatan operasionalnya.

Perencanaan merupakan fungsi manajemen yang sangat penting, karena merupakan tahap atau langkah awal dalam menentukan tujuan yang akan dicapai. Perencanaan dijadikan sebagai panduan bagi

---

<sup>16</sup> Annamaria Lusardi, 'Financial Literacy and the Need for Financial Education: Evidence and Implications', *Swiss Journal of Economics and Statistics*, 155 (1), (2019): 1, <https://doi.org/10.1186/s41937-019-0027-5>.

<sup>17</sup> Ulpha Lisni Azhari and Dedy Achmad Kurniady, 'Manajemen Pembiayaan Pendidikan, Fasilitas Pembelajaran, dan Mutu Sekolah', *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 23 (2), (2016): 26.

<sup>18</sup> Ibrahim Bafadal, *Manajemen Perlengkapan Sekolah: Teori dan Aplikasinya* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 27.

<sup>19</sup> Manaf Sumantri, *Perencanaan Pendidikan* (Bogor: IPB Press, 2014), hlm. 13.

pelaksana, pengendalian, dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan.<sup>20</sup> Perencanaan yang baik akan memberikan jaminan penggunaan anggaran pendidikan yang tepat sasaran.<sup>21</sup>

Setiap sekolah (madrasah) memiliki kewenangan dan keleluasaan dalam mengelola dana BOS dengan sebaik mungkin sesuai dengan keadaan lembaga pendidikan. Hal ini memungkinkan sekolah mengatur dan merencanakan penggunaan dana sesuai kebutuhannya, sehingga pemanfaatan dana BOS dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Perencanaan BOS di madrasah dilakukan dengan memberikan keleluasaan kepada sekolah dalam merencanakan, mengelola, dan mengawasi setiap program kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan sekolah dengan pengawasan dari masyarakat. Di samping itu, sekolah memiliki program kerja tahunan yang dikenal dengan RKAM agar semua program sekolah dalam direncanakan dengan baik termasuk dalam hal penganggarannya.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perencanaan dana BOS adalah menentukan dan menetapkan anggaran sekolah dengan menentukan segala kebutuhan-kebutuhan atau program-program yang akan dilaksanakan sekolah, demi kelancaran proses pembelajaran agar pembelajaran dapat berjalan secara efektif dan efisien. Kepala sekolah yang dalam hal ini memegang peran penting dalam penyusunan program sekolah dibantu oleh bendahara, dewan guru yang ditugaskan dan komite sekolah merumuskan perencanaan dana kegiatan yang akan dilakukan sekolah.

## 2. Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan usaha mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan melalui penciptaan iklim kerja sama yang produktif. Pelaksanaan juga mengandung makna mengarahkan, memberikan

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm.12.

<sup>21</sup> Murniati AR and Nasir Usman, 'Manajemen Pembiayaan Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran pada MTsN Janarata Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah', *Jurnal Administrasi Pendidikan*, Program Pascasarjana Unsyiah, 3 (4), (2015): 127.



dorongan, dan memerintah.<sup>22</sup> Oleh karena itu, pelaksanaan juga merupakan suatu usaha untuk mewujudkan rencana-rencana yang telah disusun pada tahap awal fungsi manajemen.

Dalam prosesnya, pengelolaan keuangan harus dilakukan secara transparan, efektif dan efisien agar dapat mencapai tujuan pendidikan.<sup>23</sup> Termasuk dalam hal realisasi anggaran, Sonedi, dkk. dalam penelitiannya menekankan pentingnya pembukuan pembiayaan pendidikan.<sup>24</sup> Pada segi pelaksanaan terdapat tiga tahap meliputi penyaluran dana, pencairan dana, dan penggunaan dana di madrasah. Pada tahap penyaluran dana BOS, pihak madrasah perlu mengacu pada petunjuk teknis yang dikeluarkan Kementerian Agama. Proses verifikasi data atau memastikan kebenaran data peserta didik sangat penting dalam menentukan alokasi dana BOS pada lembaga pendidikan. Inilah yang harus dilakukan ketika pihak sekolah menerima alokasi dana BOS.<sup>25</sup> Dalam penyaluran dana BOS, pihak madrasah terlebih dahulu harus menyampaikan Rancangan Kegiatan Anggaran Madrasah (RKAM) dalam jangka waktu satu tahun. Penyaluran dana BOS membutuhkan kerja sama dari elemen- madrasah.

Selanjutnya, tahap pencairan dana BOS sesuai aturan yang ada kepada madrasah melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Dana yang diberikan pemerintah melalui mekanisme pembayaran langsung, diawali dengan kelengkapan berkas terlebih dahulu sebelum dana dapat dicairkan oleh bank penyalur. Setelah dana dicairkan, madrasah dapat mengelola dengan baik sesuai rencana yang telah disepakati dari awal.

---

<sup>22</sup> Sondang P. Siagian, *Fungsi-Fungsi Manajemen* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm. 36.

<sup>23</sup> Durotun Nafisah, Widiyanto, and Wijang Sakitri, 'Manajemen Pembiayaan Pendidikan di Madrasah Aliyah', *Economic Education Analysis Journal*, 6 (3), (2017): 788-97.

<sup>24</sup> Sonedi, Zulfa Jamalie, and Majeri, 'Manajemen Pembiayaan Pendidikan Bersumber Dari Masyarakat: Studi pada MTs Darul Ulum Palangka Raya', *Fenomena*, 9 (1), (2017): 25-46.

<sup>25</sup> Direktorat Jenderal Pendidikan Indonesia, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 451 tahun 2018 tentang petunjuk teknis Bantuan Operasional Sekolah pada madrasah tahun anggaran 2018, hlm. 10.

Pada tahap pemanfaatan dana BOS di madrasah, perlu merujuk pada hasil musyawarah antara berbagai pihak yang berkompeten yaitu unsur lembaga pendidikan dan masyarakat. Rincian hasil musyawarah antara pihak tersebut menjadi landasan untuk mengetahui kebutuhan-kebutuhan madrasah yang akan dipenuhi oleh dana BOS. Dengan demikian, pihak Kementerian Agama Kabupaten/Kota memiliki daftar rencana masing-masing sekolah terkait pemanfaatan dana BOS.

Pemanfaatan dana BOS Madrasah, dapat digunakan bagi pembenahan bangunan madrasah, pembiayaan kegiatan awal tahun ajaran bagi siswa baru, proses belajar mengajar, pengadaan buku, kegiatan ekstrakurikuler, pembelian bahan-bahan habis pakai, kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan serta kebutuhan-kebutuhan lain yang mendesak dan diperlukan dalam pelaksanaan pendidikan. Di sinilah kemampuan sekolah dalam memilih mana prioritas pembiayaan dana BOS bagi kepentingan sekolah.

Intinya penggunaan dana BOS untuk membantu operasional madrasah atau keperluan lain yang sah dengan tetap memperhatikan peraturan terkait.<sup>26</sup> Jadi, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan dana BOS madrasah dapat dikelola dengan baik oleh setiap madrasah apabila dana bantuan yang diberikan pemerintah dapat digunakan dengan baik sesuai perencanaan awal yang telah direncanakan.

Satu hal yang penting dalam pengelolaan ini adalah transparansi atau keterbukaan dalam mengelola, berapa jumlahnya, rincian penggunaan dan pertanggungjawabannya<sup>27</sup> Selain itu transparansi dan komitmen dalam melakukan perubahan untuk peningkatan kualitas madrasah.<sup>28</sup> Hal ini penting agar penggunaan anggaran madrasah dapat

---

<sup>26</sup> Direktorat Jenderal Pendidikan Indonesia Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 451 tahun 2018 tentang petunjuk teknis Bantuan Operasional Sekolah pada madrasah tahun anggaran 2018, hlm. 25.

<sup>27</sup> Masditou, 'Manajemen Pembiayaan Pendidikan Menuju Pendidikan yang Bermutu', *Jurnal ANSIRU PAI*, 1 (2), (2017): 12.

<sup>28</sup> Trisandi and Ahmad Afrizal Rizqi, 'Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) di Daerah Perbatasan: Studi di SMP N 2 Bokan Kepulauan, Banggai Laut, Sulawesi Tengah', *Manageria: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4 (2), (2019): 335-51.

diverifikasi oleh semua pihak demi terpenuhinya prinsip transparansi dan akuntabilitas.

### 3. Pengawasan

Pengawasan (*controlling*) merupakan upaya untuk menjamin efektivitas dan efisiensi pemanfaatan dana/anggaran pendidikan yang diterima dan digunakan sesuai dengan tujuan alokasi dana tersebut.<sup>29</sup> Hal ini mencakup pelaksanaan rencana kegiatan madrasah secara baik dan tepat sasaran. Dengan adanya pengawasan yang baik, maka pemanfaatan dana pendidikan menjadi lebih terawasi. Pada akhirnya, pihak madrasah tidak akan mengalami kesulitan dalam laporan pertanggungjawaban penggunaan dana.

Sebagai konsekuensi dari penggunaan dana yang diperoleh dari pemerintah, maka perlu adanya pertanggungjawaban oleh pihak madrasah kepada pihak yang memberikan dana dalam hal ini Kementerian terkait. Jika dilihat dari perspektif pelaksana pengawasan, pengawasan dana BOS dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Pengawasan Melekat, dilakukan oleh atasan terhadap bawahannya yang mencakup pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan. Prioritas utama dalam pemanfaatan dana BOS adalah pengawasan oleh pihak Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten.<sup>30</sup>
- b. Pengawasan Fungsional Internal, dilakukan oleh petugas pemerintah yang ditugaskan sebagai pengawas. Dalam hal ini biasanya yang menjadi pengawas BOS adalah Inspektorat Jendral Kementerian Agama RI atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Selain itu, proses ini dilakukan oleh pengawas yang ditunjuk adalah diawali dengan penyusunan Usulan Program Kerja Pengawasan Tahunan (UKPT). UKPT selanjutnya disampaikan kepada BPKP untuk ditetapkan menjadi Program Kerja Pengawasan Tahunan.

---

<sup>29</sup> Matin, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2014), hlm. 185.

<sup>30</sup> Matin, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan; Konsep dan Aplikasinya* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 188.

- c. Pengawasan Eksternal, dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan melakukan audit sesuai dengan kebutuhan lembaga tersebut.
- d. Pengawasan Masyarakat menjadi bagian penting dalam pengawasan penggunaan dalam BOS. Proses pengawasan ini biasanya terdapat dari tingkat pusat hingga daerah yang memiliki fungsi untuk menjamin pemanfaatan dana sesuai dengan maksud dan tujuannya. Meski demikian, dapat pula dilakukan oleh lembaga tertentu dan lembaga yang berwenang lainnya.<sup>31</sup>

Menurut Habsyi, pembiayaan pendidikan juga menuntut adanya pertanggungjawaban pembiayaan pendidikan.<sup>32</sup> Pengawasan merupakan tanggung jawab bersama baik dari pihak internal, eksternal dan masyarakat. Pengawasan dilaksanakan untuk melihat apakah sesuai dengan perencanaan awal atau tidak, selain itu juga untuk melihat kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana. Hasil pengawasan dana BOS akan dijadikan sebagai perencanaan dana BOS di masa yang akan datang.

### **Pengelolaan Dana BOS di MAN 1 Bitung**

Pengelolaan erat maknanya dengan kegiatan manajemen karena manajemen berarti *to manage* yang berarti mengelola dan mengatur. Menurut Hasibuan, manajemen adalah ilmu seni untuk mengatur proses dari pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.<sup>33</sup> Pengelolaan menjadi bagian penting dari fungsi dan proses manajemen.

Sebagai institusi di bawah Kementerian Agama, MAN 1 Bitung diharuskan mengikuti panduan dan petunjuk penggunaan dana BOS sesuai yang diatur oleh Kementerian Agama. Untuk mewujudkan visi MAN 1 Bitung sebagai Madrasah yang unggul, bermutu dalam menyiapkan dan

---

<sup>31</sup> Direktorat Jenderal Pendidikan Indonesia Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Indonesia, Nomor 451 tahun 2018 tentang petunjuk teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Madrasah tahun anggaran 2018, hlm. 41-42.

<sup>32</sup> Irsan Habsyi, 'Manajemen Pembiayaan Pendidikan pada SMP Negeri 13 Kota Ternate', *EDUKASI*, 13 (2), (2016): 542-54, <https://doi.org/10.33387/j.edu.v14i2.199>.

<sup>33</sup> Mesiono, *Manajemen Organisasi* (Bandung: Cita Pustaka, 2014), hlm. 2.

mengembangkan sumber daya insani di bidang ilmu pengetahuan teknologi dan iman takwa, tidak kalah pentingnya juga mewujudkan pengelolaan dana pendidikan khususnya dana BOS secara benar untuk mencapai tujuan pendidikan. Oleh sebab itu, maka peningkatan mutu madrasah secara utuh perlu dilakukan termasuk dalam manajemen pembiayaan.

Berikut ini diuraikan tentang pengelolaan dana BOS di MAN 1 Bitung.

#### 1. Perencanaan

Perencanaan dana BOS merupakan salah satu langkah yang harus dilaksanakan oleh madrasah, dengan menentukan kegiatan dan jumlah anggaran yang akan diperlukan dalam proses pembelajaran. Perencanaan dilakukan secara bertahap, baik dari tingkat dewan guru, sampai kepada rapat dengan komite sekolah untuk menentukan anggaran madrasah selama satu tahun pembelajaran.

Perencanaan dana BOS MAN 1 Bitung diawali dengan dua tahapan, yaitu rapat dan sosialisasi. Rapat yang dibuat untuk menentukan Rancangan Kegiatan Anggaran Madrasah (RKAM) dan Rancangan Anggaran Belanja (RAB) yang akan dilaksanakan oleh madrasah selama satu tahun pembelajaran. Rapat ini dilaksanakan pada dua proses yaitu pertama rapat internal yang dilaksanakan oleh tim perumus anggaran perwakilan guru, dan kepala madrasah sebagai penanggung jawab BOS untuk menyusun dan merumuskan anggaran berdasarkan kebutuhan guru, dengan menggunakan skala prioritas kebutuhan. Kemudian memaparkan kepada seluruh guru untuk disepakati bersama dengan Komite madrasah.<sup>34</sup> Kegiatan ini penting untuk berkoordinasi agar semakin kompak dan solid dalam menjalankan program-program sekolah.<sup>35</sup>

Selanjutnya adalah sosialisasi dana BOS yaitu dengan menyampaikan RKAM dan RAB BOS yang telah disahkan oleh kepala madrasah dan dewan guru. Sosialisasi tersebut melibatkan komite

<sup>34</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Sudarto Katijo, Kepala Madrasah MAN 1 Bitung, Senin 17 Juni 2019, pukul 10.00 WITA

<sup>35</sup> Sri Rahmi, 'Kompetensi Manajerial Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Etos Kerja Tenaga Kependidikan di SMA N 2 Lhoknga Aceh Besar', *Manageria: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4 (2), (2019): 183-97.

madrasah dan orang tua wali siswa dengan maksud agar orang tua siswa bisa mengetahui rencana kegiatan yang telah dibuat oleh madrasah dalam tahun tersebut dan total anggaran yang dibutuhkan oleh madrasah.<sup>36</sup>

## 2. Pelaksanaan

Pelaksanaan BOS merupakan langkah selanjutnya dari proses perencanaan. Proses pelaksanaan dana BOS diawali dengan penyaluran, pencairan, penggunaan, dan pelaporan dana BOS. Dana BOS disalurkan selama satu tahun penuh kepada penerima yang dilakukan oleh satuan kerja madrasah. Penyaluran dana BOS dilaksanakan pada dua tahap, tahap pertama dilaksanakan pada bulan Februari dan tahap kedua dilaksanakan pada bulan Agustus. Penyaluran dana BOS dilaksanakan oleh Kementerian Agama Kota Bitung.<sup>37</sup>

Uraian di atas menggambarkan tahapan-tahapan dalam penyaluran dana BOS, di mana dana BOS disalurkan melalui Kementerian Agama, dan disalurkan kepada pihak MAN 1 Bitung dengan melengkapi syarat-syarat dalam penyaluran BOS. Selanjutnya pemerintah akan memproses kelengkapan administrasi pencairan. Penyaluran dana BOS tidak dicairkan seluruhnya melainkan dibagi menjadi dua tahap, yaitu pada bulan Februari dan Agustus. Hal tersebut sudah sejalan dengan petunjuk teknis BOS.

Proses pencairan dana BOS dilakukan secara tunai langsung ke pihak madrasah melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). MAN I Bitung mengikuti prosedur penyaluran berdasarkan aturan yang dikeluarkan pemerintah, dalam pencairan BOS, MAN 1 Bitung menggunakan mekanisme transfer langsung kepada rekening bank madrasah. Dalam pencairan dana BOS di MAN 1 Bitung telah sesuai dengan aturan pengelolaan BOS yang terdapat dalam petunjuk teknis BOS madrasah. MAN 1 Bitung menggunakan metode transfer ke rekening madrasah, dan diambil langsung oleh bendahara dan kepala madrasah,

---

<sup>36</sup> Hasil wawancara dengan bapak Lukman Djafar, Komite Sekoslah, Selasa 18 Juni 2019 pukul 11.00 WITA

<sup>37</sup> Hasil wawancara dengan bapak Sudarto Katijo, kepala madrasah MAN 1 Bitung, Senin 17 Juni 2019 pukul 10.00 WITA.

kemudian akan diproses oleh pihak madrasah untuk digunakan sesuai dengan perencanaan dana BOS yang telah dibuat madrasah.

Penggunaan BOS diperuntukkan bagi optimalisasi kegiatan pendidikan dan pembelajaran di madrasah. Proses penggunaan dana BOS berdasarkan dari rencana anggaran dan kebutuhan madrasah yang telah dirapatkan sebelumnya. Penggunaan dana BOS di MAN 1 Bitung diperuntukkan untuk membiayai kegiatan madrasah pada aspek peningkatan profesionalisme guru di MAN 1 Bitung.

Dana BOS merupakan sumber dana satu-satunya madrasah yang digunakan untuk membiayai kegiatan madrasah, namun walaupun dana BOS merupakan sumber dana tunggal di madrasah, tetapi mampu membuat madrasah berprestasi dalam berbagai bidang lomba, baik prestasi akademik maupun non akademik. Dengan demikian bahwa madrasah tidak mengesampingkan kualitas madrasah, strategi yang dilakukan oleh pihak madrasah adalah dengan selalu meningkatkan kompetensi dari guru.

Penggunaan dana BOS di MAN 1 Bitung, digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dan disepakati bersama pada rapat penyusunan RKAM. Pihak madrasah lebih memaksimalkan anggaran untuk peningkatan profesionalisme guru dan tenaga kependidikan, karena untuk menjadikan madrasah berkualitas harus didukung oleh kompetensi guru yang berkualitas juga.<sup>38</sup>

### 3. Pengawasan

Pengawasan merupakan tolak ukur apakah rencana yang disusun telah berjalan baik atau justru sebaliknya pengawasan BOS di MAN 1 Bitung terdiri dari pengawasan secara internal maupun eksternal dan Masyarakat. Pengawasan dilakukan oleh pihak Kementerian Agama provinsi Sulawesi Utara dan Kementerian Agama kota Bitung. Selain itu pengawasan juga dilakukan oleh Badan Pengawas Instansi Fungsional yang dalam hal ini dilakukan oleh Inspektorat Jendral Kementerian RI

---

<sup>38</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Femy Djama Guru Man 1 Bitung, Rabu Juni 2019 pukul 09.45 WITA.

dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).<sup>39</sup>

Uraian ini menunjukkan bahwa pengawasan dana BOS di MAN 1 Bitung, sesuai dengan prosedur pengawasan. Selama ini, tidak ada laporan masyarakat tentang pelanggaran penggunaan dana BOS. Bahkan dalam beberapa kegiatan, orang tua siswa dan komite madrasah turut berpartisipasi dalam membantu kegiatan pendidikan di MAN 1 Bitung sesuai dengan aturan dan hasil musyawarah bersama.

## Simpulan

Manajemen Pembiayaan khususnya dalam pengelolaan dana BOS di MAN 1 Bitung, Provinsi Sulawesi Utara dilakukan dengan tiga tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Pada tahap perencanaan, terdapat dua kegiatan yang dilakukan yaitu rapat internal dengan pelaksana dan penanggung jawab yaitu Kepala Madrasah, kemudian kegiatan sosialisasi kepada guru dan komite sekolah. Tahap selanjutnya adalah tahap pelaksanaan yang meliputi kegiatan penyaluran, pencairan, penggunaan dan pelaporan dana BOS. Dana BOS di MAN 1 Bitung lebih dialokasikan untuk meningkatkan profesionalisme dan kualitas guru serta tenaga kependidikan. Tahap akhir yaitu tahap pengawasan yang dilakukan oleh pihak Kementerian Agama maupun Badan Pengawas Keuangan (BPK).

Pengelolaan dana BOS pada MAN 1 Bitung dilakukan secara efektif dan efisien serta transparan. Sehingga dengan demikian, dana BOS dapat menunjang peningkatan kualitas pendidikan, khususnya bagi peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan. Selain itu, terdapat peningkatan pada kualitas siswa yang ditunjukkan dengan adanya prestasi baik di bidang akademik maupun non akademik. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa dengan pengelolaan yang baik dan profesional, anggaran dana BOS yang diterima madrasah dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas madrasah.

---

<sup>39</sup> Hasil wawancara dengan bapak Sudarto Katijo, Kepala madrasah MAN 1 Bitung, Senin. 17 Juni 2019 pukul 10.00 WITA.



## Daftar Referensi

- AR, Murniati, and Nasir Usman, 'Manajemen Pembiayaan pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran pada MTsN Janarata Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah', *Jurnal Administrasi Pendidikan*, Program Pascasarjana Unsyiah, 3 (4), (2015).
- Azhari, Ulpha Lisni, and Dedy Achmad Kurniady, 'Manajemen Pembiayaan Pendidikan, Fasilitas Pembelajaran, dan Mutu Sekolah', *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 23 (2), (2016).
- Bafadal, Ibrahim, *Manajemen Perlengkapan Sekolah: Teori dan Aplikasinya*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Bastian, Indra, *Akuntansi Pendidikan*, Jakarta: Erlangga, 2006.
- Budaya, Budi, 'Manajemen Pembiayaan Pendidikan Pada Sekolah Dasar Yang Efektif', *LIKHITAPRAJNA: Jurnal Ilmiah*. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 18 (1) (2017).
- Dadang Suhardan, dkk., *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Indonesia, 'Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Indonesia, Nomor 451 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Madrasah Tahun Anggaran 2018' Jakarta, 2018.
- Djupri, M, 'Model Manajemen Pembiayaan Pendidikan Menuju SBI di SMPN 2 Rembang', *The Journal of Economic Education*, 1 (1), (2012): 21–25
- Futaqi, Sauqi, and Imam Machali, 'Pembiayaan Pendidikan Berbasis Filantropi Islam: Strategi Rumah Pintar BAZNAS Piyungan Yogyakarta', *Manageria: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 3 (2), (2019), <https://doi.org/10.14421/manageria.2018.32-02>.
- Habsyi, Irsan, 'Manajemen Pembiayaan Pendidikan pada SMP Negeri 13 Kota Ternate', *EDUKASI*, 13 (2), (2016), <https://doi.org/10.33387/j.edu.v14i2.199>.
- Hamzah, 'Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah', *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, 10 (1), (2013).
- Lusardi, Annamaria, 'Financial Literacy and the Need for Financial Education: Evidence and Implications', *Swiss Journal of Economics and Statistics*, 155 (1), (2019), <https://doi.org/10.1186/s41937-019-0027-5>.
- Machali, Imam, and Ara Hidayat, *The Handbook of Education Management*, Jakarta: Prenamedia Group, 2018.
- Masditou, 'Manajemen Pembiayaan Pendidikan Menuju Pendidikan Yang Bermutu', *Jurnal ANSIRU PAI*, 1.2 (2017).
- Matin, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2014.

- Mesiono, *Manajemen Organisasi*. Bandung: Cita Pustaka, 2014.
- Mulyasa, E., *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005.
- Mulyono, *Konsep Pembiayaan Pendidikan*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010
- Nafisah, Durotun, Widiyanto, and Wijang Sakitri, 'Manajemen Pembiayaan Pendidikan di Madrasah Aliyah', *Economic Education Analysis Journal*, 6 (3) (2017).
- Osteen, Sissy, Glenn Muske, and Joyce Jones, 'Financial Management Education: Its Role in Changing Behavior', *Journal of Extension*, 45 (3), (2007).
- Phyliters, Matula, Angeline Sabina Mulwa, and Dorathy Ndunge Kyalo, 'Financial Management for Effective Schools: Bridging Theory and Practice through Competency Development among Secondary School Principals in Kitui County, Kenya', *www.ijern.com*, 6 (11), (2018).
- Rahman, Ansar, 'Efisien dalam Pembiayaan Pendidikan untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan', *Jurnal Eklektika*, 5 (2), (2017).
- Rahmi, Sri, 'Kompetensi Manajerial Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Etos Kerja Tenaga Kependidikan di SMA N 2 Lhoknga Aceh Besar', *Manageria: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4 (2), (2019).
- Siagian, Sondang P., *Fungsi-Fungsi Manajemen*, Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- Sonedi, Zulfa Jamalie, and Majeri, 'Manajemen Pembiayaan Pendidikan Bersumber Dari Masyarakat: Studi Pada MTs Darul Ulum Palangka Raya', *Fenomena*, 9 (1), (2017).
- Sumantri, Manaf, *Perencanaan Pendidikan* Bogor: IPB Press, 2014.
- Trisandi, and Ahmad Afrizal Rizqi, 'Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) di Daerah Perbatasan: Studi di SMP N 2 Bokan Kepulauan, Banggai Laut, Sulawesi Tengah', *Manageria: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4 (2), (2019).